

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.

Pendapatan dari pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang “mbumi” ataupun bahasa daerah, menggandeng dan melibatkan pemangku adat serta pemuka agama merupakan langkah-langkah yang telah ditempuh dalam upaya memberikan pengertian kepada masyarakat arti penting dan manfaat pajak (<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sinergi-membangun-bangsa>).

Salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah dengan membayar pajak. Sistem *self assessment* yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade telah terbukti menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara guna membiayai pembangunan negeri ini. Sistem pemungutan pajak ini telah berhasil menggerakkan tanggung jawab menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak ke pundak masyarakat sendiri.

Dalam sistem *self assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga

mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Mengacu pada hal tersebut di atas, tahun 2016 Pemerintah telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi melalui *e-filling*. Seruan Pemerintah ini juga ditujukan bagi karyawan BUMN/BUMD dan juga seluruh tenaga kerja di berbagai sektor, baik *profit* maupun *non-profit*. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan (khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Penggunaan *e-filling* ini lebih ditujukan untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang maksimal dan pasti kepada Wajib Pajak. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak Wajib pajak yang tidak mengikuti dalam perkembangan teknologi secara baik oleh karena adanya keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas yang memadai baik di rumah dan di kantor, serta minimnya pengetahuan. Oleh karena itu, penggunaan *e-filling* ini mengundang rasa keingintahuan yang luas bagi penulis antara lain yaitu: Pengertian tentang gambaran umum pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penerapan tarif serta contoh penghitungannya. Kemudian pelaksanaan *e-filling* ini dilapangan dan tata cara proses

pengisian dan penyampaianya. Manfaat, hambatan dan kendala yang sering muncul dilapangan baik bagi Wajib Pajak, Kantor serta cara untuk mengatasinya.

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah pada tahun 2016 mendapat himbauan untuk melakukan pengisian dan penyampaian SPT PPh Pasal 21 melalui *e-filling* sesuai dengan Surat Edaran No.SE-02/MBU/S/03/2016 Tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Melalui *e-filling*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul “TINJAUAN TERHADAP PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT PPH PASAL 21 MELALUI E-FILLING DI PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membuat pembatasan-pembatasan masalah yang bertujuan agar penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat lebih fokus dan rinci. Masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan.
- c. Bagaimana pengisian dan penyampaian Pajak Penghasilan SPT tahunan menggunakan *e-filling*.
- d. Hambatan dan upaya menggunakan *e-filling*.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Laporan Tugas Akhir**

### **1.3.1 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerepan peraturan tentang *e-filling*.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan pelaporan SPT oleh Wajb Pajak melalui *e-filling*.

- c. Untuk mengetahui kendala dan hambatan permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan pelaporan SPT melalui *e-filling*.

### **1.3.2 Kegunaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Kegunaan dari penyusunan Tugas Akhir ini antara lain adalah :

- a. Bagi penulis
  - 1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- b. Bagi Kalangan Akademik
  - 1. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.
  - 2. Sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan perpajakan.

## **1.4 Jenis Data dan Metode penelitian**

### **1.4.1 Jenis Data**

Penulisan ini tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penulisan. Berikut sumber data yang disajikan dalam laporan kerja praktik ini dibedakan menjadi 2 :

- a. Data Primer
  - Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa tengah.
- b. Data sekunder
  - Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak

buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan laporan. Metode-metode tersebut adalah observasi atau pengamatan langsung, wawancara, studi pustaka dan kuisisioner, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tata cara pengisian dan penyampaian SPT PPh Pasal 21 di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf bidang Perpajakan pada Biro Keuangan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

c. Studi pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan jalan antara lain membaca buku literatur yang ada hubungannya dengan laporan tugas akhir ini.

Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis buku-buku yang terkait seperti, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta referensi lainnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan sistematika yang penulis gunakan terdiri dari 4 (empat) bab tiap-tiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang ditulis dalam laporan ini, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data, sumber pengumpulan data, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BABII GAMBARAN UMUM PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH**

Bab ini menguraikan hal-hal mengenai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah meliputi Visi Misi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Lokasi dan Wilayah Kerja, Budaya Perum Perhutani divisi Regional Jawa Tengah, Produk-produk yang dihasilkan dan Struktur organisasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang tata cara pengisian dan penyampaian, manfaat dan hambatan *e-filling* sebagai sarana pendukung dalam penyampaian SPT PPh Pasal 21 di kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi ringkasan yang diuraikan pada BAB III dalam Laporan Tugas Akhir.